

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Perencanaan merupakan suatu proses menentukan tindakan masa depan yang tepat, melalui urutan pilihan, dengan memperhitungkan sumber daya yang tersedia (Pontoh dkk, 2008). Perencanaan merupakan proses terpenting dari semua fungsi manajemen karena tanpa perencanaan fungsi-fungsi lain tidak dapat berjalan. Perencanaan pembangunan adalah suatu perencanaan proses awal dimana manajemen memutuskan tujuan dan cara pencapaian untuk membangun sesuatu. Salah satu aspek pendukung di dalam perencanaan pembangunan yaitu pada aspek ekonomi (BAPPEDA Cilacap, 2015).

Dalam aspek ekonomi, pertumbuhan ekonomi merupakan indikator keberhasilan suatu perencanaan pembangunan (Kuncoro, 2003). Pada dasarnya suatu wilayah atau kota yang terencana dengan baik akan memiliki perekonomian yang baik, karena perekonomian yang baik mampu memberikan kesejahteraan bagi penduduk di dalamnya. Pertumbuhan dan perkembangan perekonomian suatu daerah umumnya ditunjukkan oleh indikator ekonomi makro, yaitu perubahan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dari tahun ke tahun guna mengetahui pertumbuhan ekonomi yang dicapai suatu daerah (Jamaludin, 1997). Hal ini dapat terlihat jika PDRB suatu kota meningkat maka perekonomian di kota tersebut meningkat dan berkembang. Indikator PDRB ini dapat menjadi gambaran pendapatan suatu wilayah, sehingga melalui PDRB dapat diketahui tingkat kesejahteraan dan struktur perekonomian di wilayah tersebut.

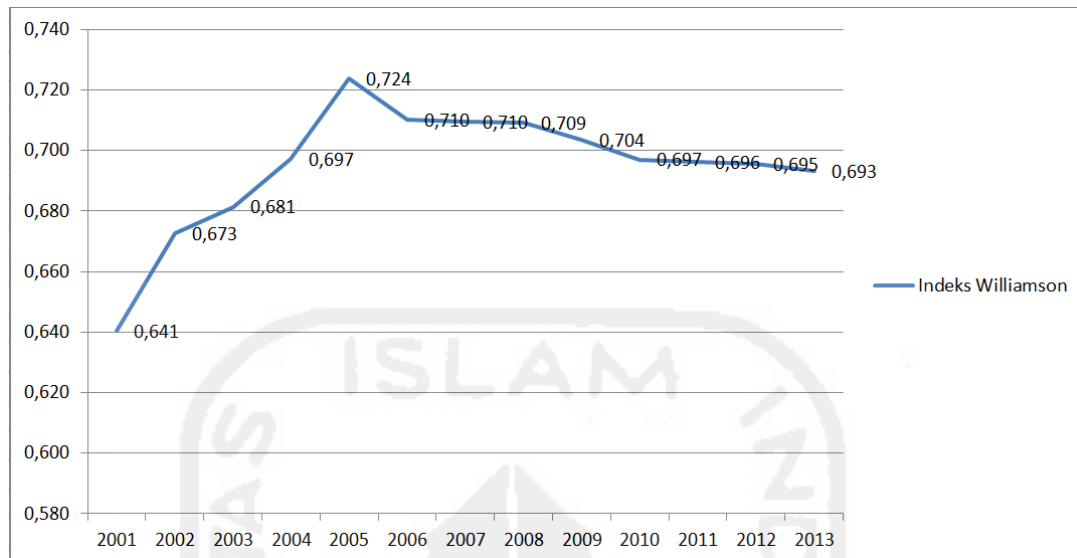
PDRB merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu wilayah tertentu, atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi (Wahyu, 2013). PDRB Atas Dasar

Harga Konstan (ADHK) menunjukkan pertumbuhan ekonomi secara keseluruhan maupun per sektor dari tahun ke tahun, sektor-sektor yang mempunyai peranan besar menunjukkan basis perekonomian suatu daerah (Tim BPS Cilacap, 2015). Suatu wilayah yang mempunyai daerah dengan rata-rata PDRB rendah tetapi di wilayah tersebut terdapat daerah yang mempunyai PDRB sangat tinggi dapat menyebabkan ketimpangan di wilayah tersebut. Ketimpangan antar wilayah merupakan aspek yang umum terjadi dalam kegiatan ekonomi suatu daerah.

Salah satu ketimpangan yang terjadi di Indonesia saat ini adalah distribusi pendapatan dan hasil pembangunan secara nasional masih belum merata pada setiap daerah, hal ini memberikan dampak terhadap masyarakat pada suatu daerah yang kurang memperoleh distribusi pendapatan, sehingga menimbulkan perbedaan pertumbuhan antar daerah dan masyarakat tersebut (Kuncoro, 2003). Adanya perbedaan pertumbuhan antar daerah menyebabkan kemampuan suatu daerah dalam mendorong proses pembangunan juga menjadi berbeda, oleh karena itu pada setiap daerah biasanya terdapat wilayah maju dan wilayah terbelakang (Sjafrizal, 2012). Perbedaan pertumbuhan pendapatan yang menyebabkan ketimpangan tersebut dalam konteks kewilayahan disebut disparitas spasial karena perbandingannya melibatkan lingkup wilayah.

Menurut Sjafrizal (2012) salah satu model yang cukup representatif untuk mengukur tingkat ketimpangan pembangunan antar wilayah adalah indeks Williamson yang dikemukakan oleh Williamson pada tahun 1965. Williamson mengemukakan model V_w (indeks tertimbang terhadap jumlah penduduk) dan V_{uw} (tidak tertimbang) untuk mengukur tingkat ketimpangan pendapatan per kapita suatu wilayah pada waktu tertentu (Wahyu, 2013). Indeks Williamson lazim digunakan dalam mengukur ketimpangan pembangunan antar wilayah. Data dasar yang digunakan dalam pengukuran indeks Williamson adalah PDRB perkapita (Asih, 2015).

Ketimpangan antar daerah terjadi di Provinsi Jawa Tengah, seperti yang tertera pada gambar 1.1 berikut:



Sumber: BPS Provinsi Jawa Tengah Tahun 2014

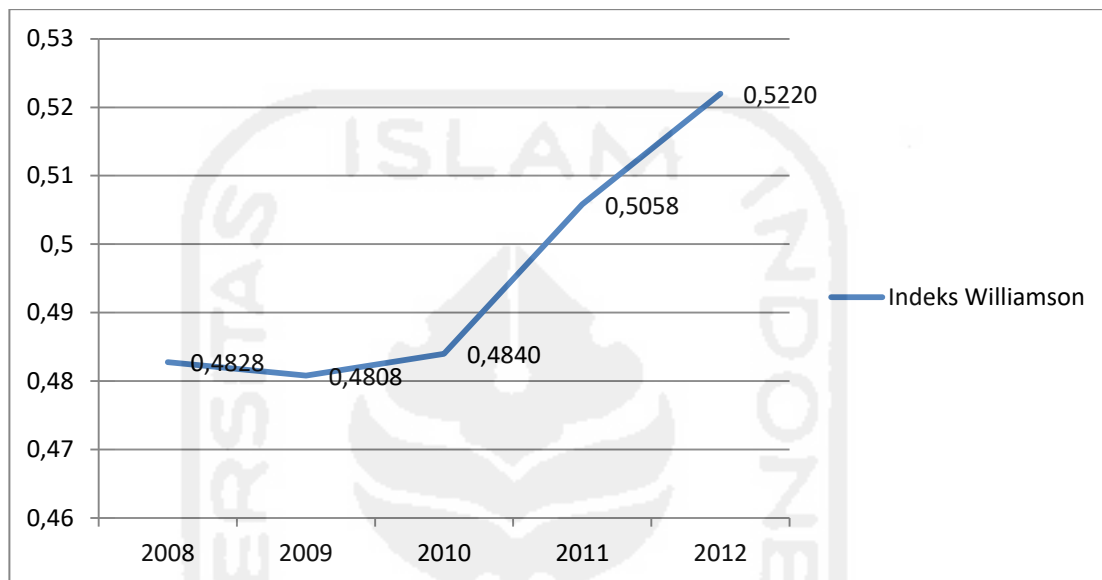
Gambar 1.1 Nilai Indeks Williamson antar Kabupaten di Provinsi Jawa Tengah Tahun 2001-2013

Berdasarkan gambar 1.1, menunjukkan bahwa ketimpangan antar kabupaten di Jawa Tengah dari tahun 2001 terus mengalami peningkatan hingga tahun 2005 dan mulai mengalami penurunan dari tahun 2006. Ketimpangan tertinggi ada di tahun 2005 dengan nilai 0,724. Disamping ketimpangan yang terjadi antar kabupaten di Provinsi Jawa Tengah, ketimpangan juga terjadi di wilayah kabupaten itu sendiri. Salah satu kabupaten yang mempunyai kerawanan dalam hal ketimpangan adalah kabupaten Cilacap.

Kabupaten Cilacap adalah salah kabupaten di provinsi Jawa Tengah, berbatasan dengan Samudra Indonesia di selatan, kabupaten Banyumas di utara, kabupaten Kebumen di timur, dan provinsi Jawa barat di barat. Terletak diantara $180^{\circ} 4' 30''$ - $109^{\circ} 30' 30''$ garis bujur timur dan $7^{\circ} 30' - 7^{\circ} 45' 20''$ garis lintang selatan, mempunyai luas wilayah $2.253,61 \text{ km}^2$, yang terbagi menjadi 24 kecamatan (Tim BPS Cilacap, 2015). Setiap kecamatan mempunyai karakteristik yang berbeda, karena setiap kecamatan mempunyai sektor unggul PDRB yang berbeda. Nilai PDRB dari suatu kecamatan menggambarkan bagaimana perkembangan ekonomi di suatu

kecamatan tersebut, seperti halnya nilai PDRB dari kabupaten Cilacap menggambarkan bagaimana perkembangan ekonomi di kabupaten Cilacap.

Besarnya ketimpangan di Kabupaten Cilacap ditunjukkan dengan gambar 1.2 berikut:



Sumber: BPS Kabupaten Cilacap Tahun 2013

Gambar 1.2 Nilai Indeks Williamson antar Kecamatan di Kabupaten Cilacap Tahun 2008-2012

Berdasarkan gambar 1.2 menunjukkan penurunan nilai indeks Williamson hanya pada tahun 2008 sampai tahun 2009, sedangkan tahun 2009 sampai tahun 2012 nilai indeks Williamson mengalami peningkatan. Permasalahan ketimpangan yang ada di kabupaten Cilacap menjadi masalah bagi pihak BAPPEDA dalam pengambilan keputusan di kabupaten Cilacap. Metode untuk memberikan solusi dalam masalah ketimpangan di kabupaten Cilacap antara lain *clustering* dan *Location Quotient*.

Dalam metode *clustering*, Algoritma *K-Means* salah satu metode yang banyak digunakan dalam analisis. *K-Means* banyak digunakan karena algoritmanya mudah dan sederhana, tetapi algoritma ini memiliki kekurangan yaitu sensitifitas pada partisi awal jumlah *cluster* (k). Untuk menyelesaikan masalah sensitifitas partisi awal jumlah

cluster pada algoritma *K-Means*, maka diusulkan algoritma *cluster* dinamik (*Dynamic K-Means Cluster*) untuk menetapkan jumlah *cluster* (k). Hasil percobaan menunjukkan bahwa algoritma *cluster* dinamik pada *K-Means*, dapat menghasilkan kualitas *cluster* yang lebih optimal (Widiarina & Wahono, 2015). Metode *Dynamic K-Means Cluster* dapat digunakan untuk memvisualisasikan sekaligus mengeksplorasi karakteristik data sehingga mempermudah dalam melihat bagaimana keadaan ekonomi di suatu wilayah. Dilanjutkan dengan analisis *Location Quotient (LQ)* dimana hasil tersebut dapat menentukan wilayah prioritas untuk dikembangkan sebagai potensi daerah. Berdasarkan pada latar belakang tersebut akan dilakukan penelitian yang berjudul “Analisis Disparitas Spasial Menggunakan *Dynamic K-Means Cluster* dan *Location Quotient* Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Cilacap Tahun 2014”.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas, permasalahan yang akan dikaji dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

1. Bagaimana tingkat ketimpangan ekonomi di kabupaten Cilacap tahun 2014 ?
2. Bagaimana karakteristik pengelompokan sektor-sektor PDRB tiap kecamatan di kabupaten Cilacap ?
3. Sektor manakah yang menjadi potensi pengembangan guna untuk mengurangi ketimpangan ekonomi di kabupaten Cilacap ?

1.3. Batasan Masalah

Penelitian ini difokuskan pada data Pendapatan Daerah Regional Bruto (PDRB) Menurut Lapangan Usaha Atas Dasar Harga Konstan Kabupaten Cilacap Tahun 2014.

1.4. Tujuan Penelitian

1. Mengetahui tingkat ketimpangan ekonomi di kabupaten Cilacap tahun 2014.

2. Mengetahui karakteristik pengelompokan sektor-sektor PDRB tiap kecamatan di kabupaten Cilacap.
3. Mengetahui sektor yang menjadi potensi pengembangan guna untuk mengurangi ketimpangan ekonomi di kabupaten Cilacap.

1.5. Manfaat Penelitian

Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan suatu gambaran langkah yang akan digunakan dalam pengambilan kebijaksanaan tahap perencanaan sebagai salah satu langkah mengurangi ketimpangan ekonomi di kabupaten Cilacap yang dilakukan oleh BAPPEDA Cilacap.

